

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Sustainability Report* merupakan laporan non-keuangan yang semakin esensial bagi perusahaan di berbagai negara, seiring meningkatnya perhatian di tingkat global maupun nasional terhadap isu keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Adnan & Akber, 2026). Meningkatnya fokus dunia usaha terhadap keberlanjutan mendorong pelaporan keberlanjutan sebagai sarana utama bagi perusahaan dalam mengkomunikasikan kinerja ESG dan arah strategi jangka panjangnya kepada para pemangku kepentingan (Pimpa, 2025). Selain itu, keberadaan pelaporan tersebut memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai praktik bisnis yang berkelanjutan yang tidak dapat diakomodasi secara memadai oleh laporan keuangan konvensional (Sebrina et al., 2023).

Penerapan *sustainability reporting* di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring menguatnya tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi perusahaan dalam meningkatnya perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Nurullah et al., 2025). Perusahaan di Indonesia dituntut untuk mengintegrasikan aspek tersebut ke dalam *sustainability report* guna berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023). Tuntutan tersebut mendorong perusahaan untuk

menyeimbangkan kinerja laba dengan tanggung jawab dalam meminimalkan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas operasionalnya.

Ukuran perusahaan, karakteristik sektor industri, tingkat kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*. Karakteristik sektor dengan intensitas ekstraktif yang tinggi menuntut tingkat transparansi yang lebih atas dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas operasionalnya. Salah satunya adalah sektor *basic materials* yang memiliki peran penting dalam memasok bahan baku berbagai industri dan menghadapi tantangan lingkungan yang cukup kompleks (Anggeriani & Maimunah, 2025). Hal ini disebabkan karena sektor ini memiliki potensi dalam menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan optimal, deforestasi, limbah yang dihasilkan dari proses operasional, dan emisi yang dihasilkan dari produksi barang mentah.

Aktivitas operasional perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan dapat dilihat dari laporan IEEFA (*Institute for Energy and Financial Analysis*) yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 terdapat empat perusahaan produsen nikel di Indonesia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca mencapai 15,3 juta ton dan berpotensi meningkat menjadi 38,5 juta ton CO<sub>2</sub> pada tahun 2028 (Peh, 2024). Perusahaan tersebut meliputi PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), dan PT Vale Indonesia (INCO). Data tahun 2024 menunjukkan bahwa ANTM menghasilkan emisi tertinggi per ton nikel sebesar 69,9 ton CO<sub>2</sub> per ton nikel (tCO<sub>2</sub>/tNi), diikuti oleh NCKL sebesar

68,4 tCO<sub>2</sub>/tNi, kemudian MBMA sebesar 56,9 tCO<sub>2</sub>/tNi, dan INCO dengan tingkat emisi terendah sebesar 28,7 tCO<sub>2</sub>/tNi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rencana ekspansi perusahaan nikel masih bertentangan dengan upaya global dalam mendorong transisi menuju energi bersih, terutama apabila masih ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil sehingga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.

Kasus lainnya yaitu adanya aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gag Nickel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk, di wilayah Raja Ampat menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi merusak ekosistem laut yang dikenal sebagai habitat bagi sekitar 75% spesies terumbu karang dunia (Greenpeace Indonesia, 2025). PT Gag Nickel memperoleh izin pertambangan nikel seluas 13.136 hektare dengan status Kontrak Karya yang berlaku sejak 2017 hingga 2047. Analisis Greenpeace mencatat kerusakan hutan lebih dari 500 hektare akibat aktivitas pertambangan, sementara sedimentasi yang dihasilkan mengancam terumbu karang dan ekosistem bawah laut. Fanny Tri Jambore, Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa Pulau Gag telah menunjukkan degradasi lingkungan yang ditandai dengan berkurangnya populasi ikan dan perubahan kawasan pesisir menjadi area dermaga pertambangan (Tempo, 2025). Parid Ridwanuddin, peneliti kelautan dari Auriga Nusantara juga menegaskan bahwa aktivitas ini juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian lebih dari 61.000 masyarakat adat dan lokal yang bermukim di kawasan UNESCO Global Geopark Raja Ampat (Kompas.id, 2025).

Kedua peristiwa tersebut merupakan bentuk nyata alasan dari pentingnya pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Sejalan dengan urgensi tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PJOK No. 51/PJOK.03/2017 yang mendorong peningkatan praktik *sustainability reporting* dengan mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan (POJK 51, 2017). Penerapan POJK tersebut diperkuat melalui diterbitkannya SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 yang memberikan panduan teknis bagi emiten dan perusahaan publik dalam menyusun laporan keberlanjutan (SEOJK 16, 2021).



**Gambar 1.1** Perusahaan Di Sektor *Basic Materials* yang Menerbitkan *Sustainability Reporting* 2016-2024

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1 tentang tren *sustainability reporting* pada sektor *basic materials* menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan cenderung mengalami peningkatan dari 2016 hingga 2024. Pada grafik berwarna merah menunjukkan tahun dimana peraturan POJK dikeluarkan. Pada tahun 2016 sebelum adanya

peraturan tersebut, hanya terdapat 5 perusahaan yang melaporkan. Pada saat tahun peraturan tersebut diterbitkan pada 2017, hanya ada 6 perusahaan yang melaporkan. Tahun selanjutnya yaitu 2018 hingga 2020 terjadi peningkatan tetapi masih minim pengungkapan dikarenakan tahun tersebut adalah masa transisi setelah diterapkannya pelaporan. Peristiwa besar juga terjadi di tahun 2019 dan 2020 yaitu terjadi pandemi yang membuat keberlangsungan perusahaan terancam, sehingga perusahaan yang melaporkan juga masih minim, tetapi tetap terdapat peningkatan yaitu sebanyak 14 dan 20 perusahaan dari 113 perusahaan di sektor *basic materials*. Hal ini disebabkan oleh beberapa perusahaan yang menilai bahwa kewajiban pengungkapan *sustainability report* menyulitkan perusahaan karena biaya penyusunannya dianggap lebih besar dibandingkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh (Nishitani et al., 2021).

Peningkatan jumlah perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* pada tahun 2021 hingga 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi SEOJK, tetapi juga menunjukkan adanya respon perusahaan terhadap tuntutan transparansi terkait pengungkapan informasi keberlanjutan. Bertambahnya jumlah perusahaan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 yang relatif stabil mengindikasikan bahwa perusahaan mulai menggunakan *sustainability report* sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang sehingga memperlihatkan bahwa praktik ini semakin terintegrasi dalam aktivitas operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan mencerminkan komitmen perusahaan dalam berkontribusi terhadap pencapaian

pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan (Jayantini, 2023).

Standar dan regulasi terkait dengan penerapan strategi keberlanjutan telah meningkat di era milenium ini (Oorschot et al., 2024). Salah satu perkembangan kerangka pelaporan tersebut adalah hadirnya IFRS S1 dan S2 yang disusun oleh *International Sustainability Standards Board (ISSB)*. Adanya standard IFRS S1 dan S2 bertujuan membuat standar pengungkapan keberlanjutan dan menggabungkannya dengan pelaporan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi dan keterbandingan (Pratama et al., 2024). IFRS S1 merupakan pedoman terkait pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan secara umum, sedangkan IFRS S2 terkait pengungkapan khusus mengenai risiko dan peluang iklim (PwC, 2023).

Pada praktiknya, implementasi standar pelaporan keberlanjutan juga didukung oleh berbagai kerangka pelaporan yang lebih dahulu berkembang dan digunakan secara luas oleh perusahaan. *Global Reporting Initiative (GRI)* menjadi salah satu pedoman yang paling banyak digunakan di Indonesia dalam penyusunan laporan keberlanjutan. GRI merupakan pedoman yang digunakan untuk mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang timbul dari aktivitas operasionalnya, sekaligus menyajikan informasi terkait kontribusi positif atau negatif terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan (GRI, 2021). Standar ini menyediakan pedoman bagi perusahaan secara tersruktur, jelas, dan sistematis.

Perusahaan semakin menyadari bahwa penerapan praktik berkelanjutan berperan penting dalam memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan serta meningkatkan reputasi perusahaan, tidak hanya terbatas pada pencapaian keuntungan finansial jangka pendek (Suhartini et al., 2024). Elkington (1998) mengemukakan konsep *triple bottom line*, yang mendukung perusahaan dalam melakukan praktik bisnis yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh laba (*profit*), tetapi juga pemenuhan pada tanggung jawab sosial (*people*) serta pelestarian lingkungan (*planet*). Perusahaan yang mengimplementasikan prinsip ini cenderung dipandang memiliki *image* baik dan bertanggung jawab di mata para pemangku kepentingan, karena mempertimbangkan dampak sosial lingkungan dalam setiap aktivitas operasional bisnisnya (Jagani & Saboori-Deilami, 2025). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perusahaan menyusun *sustainability report* untuk memperoleh kepercayaan serta pengakuan dari para pemangku kepentingan.

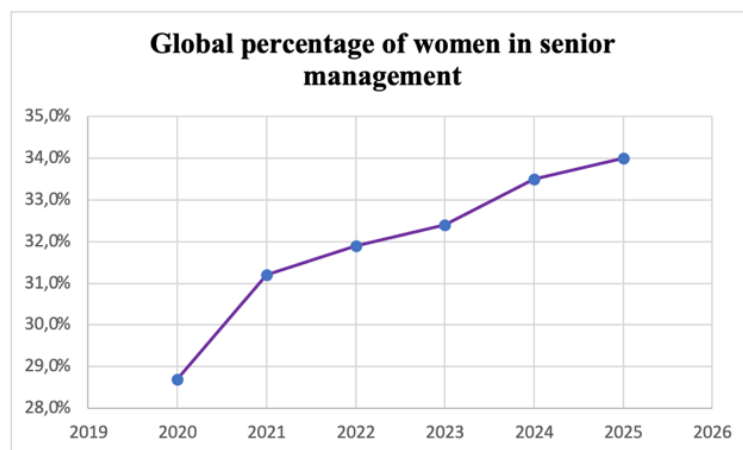
Kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen perusahaan melalui *sustainability report* tidak hanya bergantung pada tersedianya laporan tersebut, tetapi juga pada seberapa mendalam informasi keberlanjutan yang diungkapkan. Salah satu aspek tata kelola yang dinilai dapat memengaruhi keluasan pengungkapan keberlanjutan perusahaan adalah representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan sebagai wujud keberagaman gender, khususnya pada dewan direksi (Nugraha, 2024). Perempuan umumnya memiliki karakteristik unik yang berbeda dibandingkan laki-laki, seperti

menghindari risiko dan mengutamakan moral di saat mengambil keputusan (Kirana et al., 2026). Peran tersebut semakin relevan dalam perkembangan isu kesetaraan gender yang mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam posisi strategis perusahaan.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan perempuan sebagai pemimpin menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Emansipasi perempuan dan kesetaraan gender secara perlahan menjadi isu utama secara global, terutama di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) kelima, yaitu pencapaian kesetaraan gender (*Gender Equality*) sebagai bagian dari upaya mendorong keberagaman dan inklusivitas dalam berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. Keberagaman gender dalam SDGs menunjukkan bahwa diperlukan upaya keadilan melalui penyetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Mustakimah et al., 2023).

Perusahaan yang menerapkan adanya keberagaman gender dalam dewan direksi cenderung mampu menghadirkan perspektif yang lebih beragam dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya (Santoso et al., 2025). Kondisi ini membuat perusahaan semakin memberikan perhatian terhadap keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan karena perannya juga dinilai mampu mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Perempuan sering dinilai memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap kebutuhan sosial, perhatian yang lebih besar terhadap kepentingan pihak lain, serta kepedulian terhadap isu-isu etika dibandingkan

laki-laki. Proporsi perempuan yang lebih tinggi dalam dewan direksi turut berpotensi mendorong gaya komunikasi yang lebih jelas sehingga dapat meningkatkan keterbacaan dan kejelasan pengungkapan keberlanjutan (Sánchez-Hernández et al., 2025).



**Gambar 1.2 Persentase Perempuan Di Jajaran Manajemen Senior Secara Global**

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan data *Grant Thornton International Business Report (IBR) research*, pada periode 2020–2025, dapat diketahui bahwa keterwakilan perempuan dalam posisi manajemen senior secara global menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, persentase perempuan yang menduduki jabatan manajemen senior tercatat sebesar 28,7%. Angka ini kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 31,2%, yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan pada level kepemimpinan. Selanjutnya, tren kenaikan berlanjut pada tahun 2022 sebesar 31,9% dan tahun 2023 sebesar 32,4%. Pada tahun 2024, persentase tersebut kembali meningkat menjadi 33,5%, hingga mencapai 34,0% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa secara global terdapat

perkembangan positif dalam representasi perempuan di posisi strategis perusahaan, meskipun proporsinya masih belum mencapai tingkat kesetaraan yang seimbang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Harymawan & Nismara (2022) yang menyatakan bahwa representasi perempuan yang lebih tinggi di dewan direksi menunjukkan keterkaitan dengan meningkatnya tingkat inovasi yang dihasilkan perusahaan. Perempuan di dewan direksi dapat memberikan perspektif baru, pengalaman, gaya kerja, pengetahuan, dan keahlian yang membantu dalam mengidentifikasi peluang inovatif baru. Hal ini diperkuat dengan studi Sari et al., (2024) bahwa keberadaan direktur perempuan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan ESG perusahaan karena mampu menghadirkan sudut pandang yang lebih beragam serta memperkuat pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan.

Teori legitimasi yang diperkenalkan pertama kali oleh (Dowling & Pfeffer, 1975) menjelaskan bahwa organisasi perlu menjalankan setiap kegiatannya sesuai dengan norma masyarakat, nilai-nilai sosial, serta harapan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Lewa et al., (2024) menyatakan bahwa keberagaman dewan direksi melalui keterwakilan perempuan dapat memperkuat legitimasi perusahaan karena menunjukkan pesan positif kepada masyarakat bahwa perusahaan telah memperhatikan norma dan harapan sosial yang berlaku. Kehadiran perempuan dalam dewan direksi juga mendorong perusahaan untuk berada pada posisi yang aman dalam meminimalkan risiko

serta membangun hubungan positif dengan pemangku kepentingan melalui pengungkapan *sustainability report* (Lestiananda et al., 2023). Selain itu, representasi perempuan yang lebih tinggi dinilai mampu menghasilkan pengungkapan keberlanjutan yang lebih transparan dan kredibel (Ma'wa & Setiawan, 2025).

Keberagaman gender dalam dewan memungkinkan terjadinya pertimbangan yang lebih luas dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Rahman et al., (2024) mengemukakan bahwa perusahaan dengan direktur perempuan di dewan direksi memiliki *quality of corporate sustainability disclosure* (QCSD) yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Beberapa temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi berkontribusi terhadap peningkatan tingkat pengungkapan *sustainability report* (Qaderi et al., 2022; Santoso et al., 2025; Sari et al., 2024). Selain keberadaan perempuan yang diharapkan mampu meningkatkan pengungkapan *sustainability report*, terdapat variabel lain yaitu *ESG Committee* sebagai salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

Pembentukan komite ESG dalam struktur tata kelola perusahaan menjadi salah satu langkah yang diambil perusahaan di Indonesia untuk memperkuat penerapan praktik ESG di bawah pengawasan dewan. Keberadaan komite tersebut dipandang mampu meningkatkan reputasi perusahaan sekaligus memperkuat legitimasi di mata para pemangku kepentingan (Aprullah et al., 2025). Perusahaan memandang keberlanjutan

sebagai bagian dari strategi bisnis yang mencakup pengambilan keputusan investasi penting dan bertujuan untuk memenuhi tuntutan investor saat ini maupun di masa mendatang dengan memanfaatkan secara efektif aktivitas perusahaan. Investor menjadikan kinerja ESG sebagai kriteria utama dalam menilai prospek dan stabilitas jangka panjang suatu perusahaan (Rosyidah & Ningsih, 2025).

Kriteria ESG yang mencakup indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola, digunakan oleh investor dan perusahaan untuk menilai risiko, dampak, dan peluang keberlanjutan (KPMG, 2025). Perhatian yang semakin besar terhadap aspek ESG di kalangan perusahaan, pembuat kebijakan, dan regulator dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan orientasi korporasi ke arah praktik bisnis yang berkelanjutan (Rosyidah & Ningsih, 2025). Kondisi tersebut menjadikan ESG sebagai salah satu komponen utama dalam strategi perusahaan untuk merespon tuntutan regulasi sekaligus membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sehingga diperlukan mekanisme tata kelola internal yang mampu memastikan implementasinya berjalan efektif.

Komite ESG hadir sebagai salah satu bentuk struktur tata kelola yang dibentuk untuk mengarahkan dan mengawasi strategi keberlanjutan, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Komite ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen ESG serta memberikan rekomendasi terkait perumusan strategi, pengelolaan risiko, dan komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan (Yang, 2025). Eksistensi komite ESG tidak

dibentuk sebagai tindakan simbolis, tetapi berperan dalam merumuskan strategi yang diarahkan pada pencapaian keberlanjutan perusahaan dan akan memberikan nilai positif di mata investor (Hia & Gunawan, 2025). Hal tersebut didukung studi (Thun & Zülch, 2023) yang menyatakan keberadaan komite ESG berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan dalam menggunakan jasa penjamin eksternal atas laporan keberlanjutan, sehingga hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan dan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Teori *stakeholder* yang diperkenalkan Freeman (1984) menjelaskan bahwa bahwa perusahaan perlu memperhatikan berbagai pemangku kepentingan karena setiap kelompok atau individu dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas organisasi. Keberadaan komite ESG menunjukkan komitmen perusahaan dalam merespon tuntutan berbagai pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan perusahaan, sehingga hubungan dengan para pemangku kepentingan dapat terjaga dan kebutuhan informasi keberlanjutan dapat dipenuhi (Daniel-Vasconcelos et al., 2022). Mengacu pada penelitian Omran et al., (2021) menyatakan komite ESG independent cenderung menghasilkan pengungkapan ESG yang lebih baik dan kinerja yang lebih baik. Selain itu, perusahaan dengan jumlah komite ESG yang lebih tinggi cenderung memberikan pengungkapan ESG yang lebih baik dan meraih kinerja ESG yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain (Suttipun & Dechthanabodin, 2022).

Perbedaan utama dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus objek penelitian yang secara khusus pada emiten-emiten yang bergerak di sektor *basic materials* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sektor ini didasarkan pada besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan, khususnya dari produksi nikel yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan aktivitas pertambangan pada komoditas nikel, emas, semen, dan material konstruksi. Periode observasi dilakukan selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Pemilihan periode penelitian didasarkan pada pedoman terbaru yaitu 16/SEOJK.04/2021 yang mengatur tentang panduan teknis penyusunan *sustainability report* yang mulai berlaku pada 29 Juni 2021.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kebaruan tidak hanya dari aspek objek dan rentang waktu penelitian, tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru yang berkaitan dengan praktik pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh *board gender diversity* dan *ESG Committee* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* Pada Sektor *Basic Materials* 2022-2024.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *board gender diversity* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?
2. Apakah *ESG Committee* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh *board gender diversity* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
2. Menguji pengaruh *ESG Committee* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, terutama literatur terkait pengungkapan *sustainability report* dan faktor internal perusahaan yang memengaruhinya, yaitu *board gender diversity* dan keberadaan *ESG Committee*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

dimanfaatkan sebagai rujukan bagi studi berikutnya yang mengangkat isu keberlanjutan, khususnya pada perusahaan sektor *basic materials*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktik**

##### **a. Bagi Peneliti**

Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan ilmu akuntansi terkait *sustainability report disclosure* sekaligus mengembangkan pemikiran ilmiah berdasarkan pengetahuan, wawasan, dan teori yang telah dipelajari.

##### **b. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat menjadi informasi pendukung sekaligus bahan pertimbangan untuk meningkatkan pemahaman mengenai *board gender diversity* dan keberadaan *ESG Committee* terhadap pengungkapan *sustainability report* serta sebagai dasar evaluasi dalam merumuskan strategi pelaporan keberlanjutan sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.

##### **c. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan menjadi inovasi akademik yang memberikan kontribusi terhadap kualitas ilmu pengetahuan di lingkungan universitas serta mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian.